

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT PENGELUARAN

2016-2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESISIR SELATAN
MENURUT PENGELUARAN**

2016-2020



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT PENGELUARAN 2016-2020

ISBN : 978-602-5481-86-4

Nomor Publikasi : 13020.2104

Katalog : 9302020.1302

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 57 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan

Dicetak Oleh:

CV. Adyta (Cetakan I: Juni 2021)

CV. Adyta (Cetakan II: Juli 2021)

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT PENGELUARAN
2016-2020**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Yudi Yos Elvin, S.Si, M.Si

Penulis:

Indah Sri Ramadhani, S.ST

Penyunting:

Yudi Yos Elvin, S.Si, M.Si

Ir. Sunaryon

Anna Rahmayanti Bahsuan, S.ST

Reno Warni Diva Rahmitri, S.Si



KATA PENGANTAR

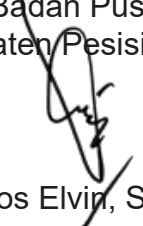
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) serta Ekspor Neto (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini dan publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Ucapan terima kasih kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Sangat disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Painan, April 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesisir Selatan



Yudi Yos Elvin, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	13
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	15
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	17
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5. Perubahan Inventori.....	23
2.6. Ekspor Impor	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	27
3.1. Perkembangan Agregat PDRB Kabupaten Pesisir Selatan	29
3.2. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32
3.3. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT.....	34
3.4. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	35
3.5. Perkembangan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto	36
3.6. Perkembangan Komponen Perubahan Inventori	37
3.7. Perkembangan Komponen Net Ekspor.....	38
3.8. Perkembangan Impor Barang dan Jasa	39
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	41
4.1. Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)	43
4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	44
4.3. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	45
BAB V PENUTUP	47
BAB VI LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Deflator yang Digunakan untuk Mengestimasi Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan.....	20
Tabel 3.1.1.	Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020	30
Tabel 3.1.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020	31
Tabel 3.1.3.	Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020.....	32
Tabel 3.2.1.	Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020	33
Tabel 3.3.1.	Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020.....	34
Tabel 3.4.1.	Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020	35
Tabel 3.5.1.	Perkembangan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020.....	36
Tabel 3.6.1.	Perkembangan Komponen Perubahan Inventori Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020.....	37
Tabel 3.7.1.	Perkembangan Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020.....	38
Tabel 3.8.1.	Perkembangan Komponen Impor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020.....	39
Tabel 4.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020	43
Tabel 4.2.1.	Distribusi Pengeluaran Konsumsi Akhir Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020.....	44
Tabel 4.3.1.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah), 2016-2020	30
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pegeluaran (Milyar Rupiah), 2016-2020.....	53
Lampiran 2.	PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pegeluaran (Milyar Rupiah), 2016-2020.....	53
Lampiran 3.	Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	54
Lampiran 4.	Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	54
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	55
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	55
Lampiran 7.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	56
Lampiran 8.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	56
Lampiran 9.	Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	57
Lampiran 10.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020	57

1. PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku):
*digunakan untuk melihat pergeseran
serta struktur ekonomi*

2. PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan):
*digunakan untuk melihat pertumbuhan
ekonomi antar periode (triwulanan atau tahunan)*

1

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah selain bentuk tampilan lain seperti; PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB menurut pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik, luar wilayah, bahkan luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB menurut pengeluaran ini seperti; variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik, serta Ekspor dan Impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Meskipun demikian, PDRB menurut pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB menurut lapangan usaha menggambarkan aktivitas produksi serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB menurut pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep², penghitungan PDRB dari dua sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²*Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F number 30 United Nations)*

estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul yang dinamakan selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik dan digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu perdagangan produk impor terus berkembang, baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB menurut lapangan usaha (Y) sama besar dengan PDRB menurut pengeluaran (E). Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB menurut pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB diharapkan tidak lagi mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB menurut pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³ yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Dari sudut pandang lain, PDRB menurut pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB menurut lapangan usaha
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB menurut lapangan usaha akan “identik” dengan PDRB menurut pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB menurut lapangan usaha, berdasarkan PDRB menurut pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti; nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir,

³Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik. Disebut juga sebagai pendekatan “riil”. Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut.

pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB menurut pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia, kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya adalah aktivitas produksi, konsumsi dan aktivitas

akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- ◆ Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- ◆ Meningkatkan kualitas PDRB;
- ◆ Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- ◆ Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- ◆ Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- ◆ Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 Sebagai Tahun Dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

- ◆ Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- ◆ Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- ◆ Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;

⁴SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”

- ♦ Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- ♦ Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index);
- ♦ Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi pada SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi ke dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- ♦ Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contohnya adalah nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB, seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB, seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa

intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

- f. Software komputer (*computer software and database/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan database yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

♦ Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan diestimasi dengan metode FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposit*), bunga pinjaman (*loan*) dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).

♦ Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*basic price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

♦ Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC Rev. 4) dan *Central Product Classification* (CPC Rev. 2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Berikut adalah ringkasan perubahan klasifikasi produk domestik regional bruto menurut pengeluaran tahun dasar 2000 dan 2010:

Tabel 1.2.1. Perubahan Klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2020
(1)	(2)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Perubahan Inventori	Perubahan Inventori
Ekspor	Ekspor
Impor	Impor

Komponen PDRB menurut Pengeluaran:

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)
- Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT)
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
- Perubahan Inventori (PI)
- Net Ekspor (X-M)

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, terutama kelompok makanan dan perumahan.

Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

- ♦ Makanan dan minuman tidak beralkohol
- ♦ Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- ♦ Pakaian dan alas kaki
- ♦ Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- ♦ Mebel, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin

- ♦ Kesehatan
- ♦ Angkutan
- ♦ Komunikasi
- ♦ Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- ♦ Pendidikan
- ♦ Penyediaan makan, minum dan penginapan/hotel
- ♦ Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PKRT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

- ♦ Makanan, minuman dan rokok
- ♦ Pakaian dan alas kaki
- ♦ Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga
- ♦ Kesehatan dan pendidikan
- ♦ Transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya
- ♦ Hotel dan restoran
- ♦ Lainnya

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PKRT bersumber dari:

- ♦ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- ♦ Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- ♦ Sensus Penduduk 2010, BPS
- ♦ Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- ♦ Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

Metode Estimasi

Komponen PKRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

- ♦ Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PKRT Tahunan);
- ♦ Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun kemudian dikalikan 12 (PKRT Tahunan) ;
- ♦ Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
- ♦ Terhadap data poin 3 kemudian dilakukan kontrol atau koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
- ♦ Diperoleh nilai PKRT Tahunan atas dasar harga berlaku;
- ♦ Susun Indeks implisit PKRT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
- ♦ Nilai PKRT atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- ♦ LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- ♦ Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- ♦ Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ♦ Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;
- ♦ Istilah non-profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Cakupan

Nilai PKLNPRRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- ♦ Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain
- ♦ Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- ♦ Penyusutan
- ♦ Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan sebagainya

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PKLNPRT bersumber dari:

- ♦ Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (SKLNPRT), BPS
- ♦ SKLNP Triwulanan (SKLNPT), BPS
- ♦ Hasil updating direktori LNPRT, BPS
- ♦ Indeks Harga Konsumen, BPS

Metode Estimasi

Komponen PKLNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

- ♦ Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SKLNP;
- ♦ Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari direktori LNPRT;
- ♦ Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol atau koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SKLNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai event seperti Munas, Rakerda, dan penanganan bencana;
- ♦ Diperoleh nilai PKLNPRT Tahunan atas dasar harga berlaku;
- ♦ Susun Indeks implisit PKLNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- ♦ Nilai PKLNPRT atas dasar harga konstan diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai

pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, nilai output dari Bank Indonesia dan kemudian dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum mencakup kegiatan sebagai berikut:

- ♦ Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya adalah aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang tersebut itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- ♦ Memproduksi jasa. Contohnya adalah aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

- ♦ PKP kabupaten/kota mencakup: a). PKP desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PKP kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PKP pusat yang merupakan bagian dari PKP kabupaten/kota.

Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PKP Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

- ♦ Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan BAPPEDA
- ♦ Statistik Keuangan Daerah, BPS
- ♦ Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- ♦ Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan BAPPEDA
- ♦ Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- ♦ Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

Metode Estimasi

Komponen PKP Kabupaten/Kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PKP ADHB} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfers in the form of purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Komponen PKP Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan. PKP atas dasar harga konstan diestimasi dengan mendeflasi PKP atas dasar harga berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Tabel 2.3.1. Deflator yang Digunakan untuk Mengestimasi Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan Barang dan Jasa	IHK umum	Provinsi atau Kabupaten/Kota terdekat
<i>Social Transfer in the Form of Purchased Market Production</i>	IHK umum	Provinsi atau Kabupaten/Kota terdekat
Output Bank Indonesia		Neraca Jasa

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian pada kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam

tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Cakupan

Cakupan Pembentukan Modal Tetap Bruto antara lain sebagai berikut:

- ♦ Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*) dan, produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
- ♦ Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- ♦ Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk mengestimasi nilai PMTB adalah:

- ♦ Output industri konstruksi, BPS
- ♦ Nilai impor 2 digit HS, BPS
- ♦ Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- ♦ Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- ♦ Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- ♦ Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- ♦ Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS

- ♦ Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum, BPS
- ♦ Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- ♦ Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ♦ Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung, tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ♦ Metode Langsung:

PMTB ADHB (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB ADHK (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mendeflasi PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

- ♦ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply

PMTB ADHB = Total *Supply* Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi

PMTB ADHK_(t) = PMTB atas dasar harga konstan_(t-1) x Indeks Produksi_(t)

2.5. Perubahan Inventori

Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen perubahan inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto atau lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa

komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- ◆ Inventori menurut industri seperti produk hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih serta konstruksi;
- ◆ Berbagai jenis bahan baku dan penolong (material and supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- ◆ Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- ◆ Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- ◆ Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- ◆ Ternak untuk tujuan dipotong;
- ◆ Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan;
- ◆ Persediaan pada pemerintah yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- ◆ Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- ◆ Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, data sekunder dari luar BPS;
- ◆ Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;

- ♦ Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- ♦ Data komoditas perkebunan;
- ♦ Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- ♦ Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) terpilih;
- ♦ Data persediaan beras, Bulog;
- ♦ Data semen, Asosiasi Semen Indonesia;
- ♦ Data gula, Dewan Gula Indonesia;
- ♦ Data ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi tergantung jenis komoditasnya.

♦ Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI ADHB} = (\text{Volume inventori}_{(t)} - \text{Volume inventori}_{(t-1)}) \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI ADHK} = \text{PI ADHB} \div \text{IHPB}$$

♦ Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI ADHK} = \text{Inventori ADHB}_{(t)} / \text{IHPB}_{(t)} - \text{Inventori ADHK}_{(t-1)} / \text{IHPB}_{(t-1)}$$

$$\text{PI ADHB} = \text{PI ADHK} \times \text{IHPB rata-rata}_{(t)}$$

2.6. Ekspor Impor

Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam

barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

Cakupan

Ekspor-impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- ♦ Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- ♦ Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.



PDRB

Atas Dasar
Harga Berlaku

Rp13.995,04 Milyar

Tahun 2020

PDRB

Atas Dasar
Harga Konstan
2010

Rp9.470.78 Milyar

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Perubahan struktur ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perubahan perilaku masing-masing komponen pada konsumsi akhir. Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional dan kondisi dunia. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Pesisir Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah), sedangkan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

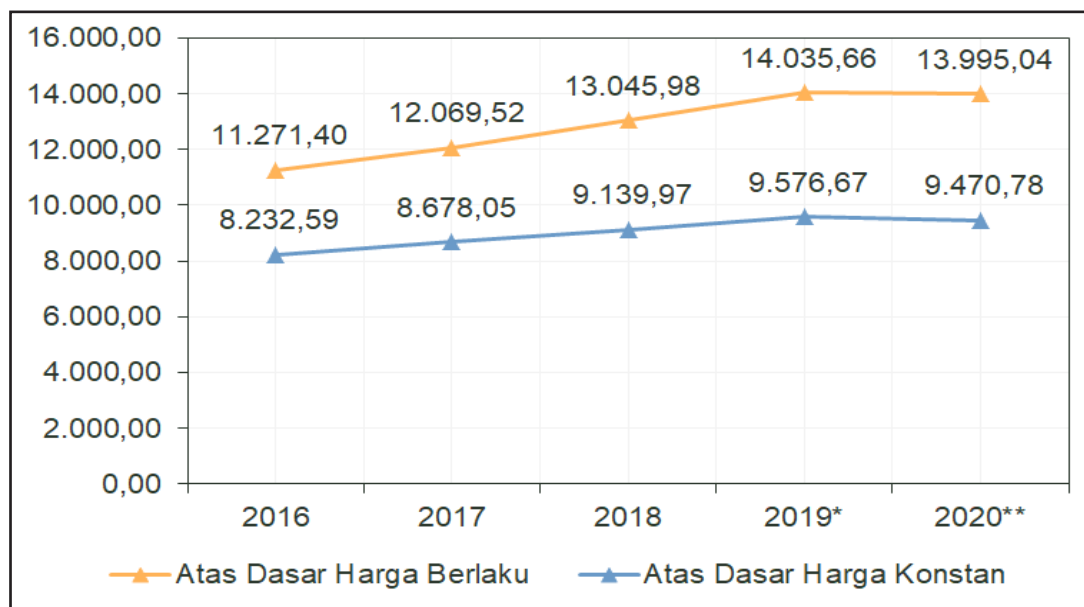
3.1. Perkembangan Agregat PDRB Kabupaten Pesisir Selatan

Kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan hingga tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, sejak awal tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan turut terkena imbas dari pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Banyaknya aktivitas ekonomi yang lumpuh selama pandemi tercermin dari penurunan nominal dan pertumbuhan negatif total PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada tahun 2020, total seluruh permintaan akhir barang dan jasa atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan adalah senilai 13.995,04 milyar rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2019, nilai tersebut berkurang sebanyak 40,61 milyar rupiah. Selama periode 2016-2020, rata-rata PDRB Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 12.883,52 milyar rupiah dengan rata-rata peningkatan atau penurunan sebesar 680,91 milyar rupiah setiap tahunnya.

Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga konstan juga menunjukkan pola peningkatan dan penurunan yang sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku selama periode 2016-2020. PDRB atas dasar harga konstan memberikan gambaran perubahan ekonomi dari segi kuantitas tanpa adanya pengaruh perubahan harga. Pada umumnya, PDRB atas dasar harga berlaku akan bernilai lebih besar daripada PDRB atas dasar harga konstan. Hal itu disebabkan oleh adanya faktor perubahan harga tersebut.

Gambar 3.1.1. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah), 2016-2020



Keterangan:

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

PDRB menurut pengeluaran terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa (X-M).

Tabel 3.1.1. Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	53,94	54,00	54,12	55,24	53,08
2	Konsumsi LNPRT	1,14	1,10	1,11	1,18	1,14
3	Konsumsi Pemerintah	12,90	12,44	12,54	12,47	11,58
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,48	30,32	30,26	30,39	29,81
5	Perubahan Inventori	1,29	0,06	0,08	0,03	0,12
6	Ekspor	62,57	70,73	67,25	65,92	57,48
7	Impor	62,32	68,65	65,36	65,24	53,21
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2020. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 54,08 persen. Setelah PKRT, ekspor juga mempunyai peran yang besar. Rata-rata per tahun produk Kabupaten Pesisir Selatan yang berhasil menembus pasar nasional hingga internasional selama periode 2016-2020 adalah sebesar 64,79 persen. Selain melakukan ekspor ke luar daerah, rata-rata sebanyak 62,96 persen permintaan domestik per tahun masih dipenuhi dari produk impor. Selama periode 2016-2020, jumlah produk domestik yang diperdagangkan ke luar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan lebih besar daripada barang yang didatangkan dari luar wilayah. Dengan kata lain, neraca perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut mengalami surplus.

Selanjutnya, pengeluaran untuk kapital yang dilihat dari komponen PMTB juga mempunyai peran yang relatif cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Rata-rata kontribusi komponen PMTB selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 30,25 persen per tahun. Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi pemerintah selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada rentang 11,58 sampai 12,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Kontribusi terkecil dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan datang dari komponen konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Rata-rata peranan masing-masing komponen per tahun adalah 1,14 persen dan 0,12 persen.

Tabel 3.1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,73	5,20	5,02	4,43	-4,83
2	Konsumsi LNPRT	4,74	4,40	5,52	13,39	-4,76
3	Konsumsi Pemerintah	0,93	-0,73	4,48	5,11	-8,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,84	4,52	3,64	4,98	-3,01
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	10,43	10,71	1,55	6,75	-14,73
7	Impor	6,79	7,07	0,21	6,83	-20,91
PDRB		5,33	5,41	5,32	4,78	-1,11

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat menggambarkan kinerja pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di bidang ekonomi. Setelah mengalami sedikit percepatan di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan lantas melambat hingga tahun 2020. Di tahun 2020, Kabupaten Pesisir Selatan bahkan mengalami kontraksi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif. Secara berurut, pertumbuhannya selama periode 2016-2020 masing-masing sebesar 5,33 persen (2016), 5,41 persen (2017), 5,32 persen (2018), 4,78 persen (2019) dan -1,11 persen (2020).

Tabel 3.1.3. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	138,08	140,69	145,12	152,62	153,66
2	Konsumsi LNPRT	134,02	132,52	136,58	138,68	140,38
3	Konsumsi Pemerintah	146,79	152,68	159,24	161,99	164,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	135,32	137,89	143,55	147,74	148,96
5	Perubahan Inventori	138,30	141,47	141,54	143,85	150,52
6	Ekspor	129,86	142,00	143,71	141,97	144,76
7	Impor	131,75	145,13	149,05	149,83	154,05
PDRB		136,91	139,08	142,74	146,56	147,77

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Indeks harga implisit PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), menunjukkan peningkatan. Secara total, indeks harga implisit terus meningkat dari 136,91 persen di tahun 2016 hingga mencapai 147,77 persen pada tahun 2020.

3.2. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Selama kurun waktu 2016-2020, konsumsi akhir rumah tangga selalu memegang peranan terbesar dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan menurut pengeluaran. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor yang ada digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu yang

sama, konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan baik dari segi nominal (ADHB) maupun riil (ADHK) hingga tahun 2019. Besaran konsumsi akhir oleh rumah tangga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat sehari-hari. Kehadiran Covid-19 di tengah masyarakat berdampak pada kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Berkurangnya penawaran dan ketersediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik menjadi pemicu penurunan tingkat konsumsi rumah tangga.

Selama periode 2016-2020, rata-rata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 54,08 persen setiap tahunnya. Kontribusi komponen ini terus meningkat dari 53,94 persen di tahun 2016 menjadi 55,24 persen di tahun 2019. Peranannya kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 53,08 persen.

Tabel 3.2.1. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	6.080,21	6.517,29	7.060,25	7.753,72	7.428,98
b.	ADHK	4.403,46	4.632,33	4.864,96	5.080,25	4.834,78
Proporsi ADHB dalam total PDRB (Persen)		53,94	54,00	54,12	55,24	53,08
Laju pertumbuhan ADHK (Persen)		4,73	5,20	5,02	4,43	-4,83
Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Juta Rupiah)						
a.	ADHB	13,40	14,25	15,32	16,71	15,91
b.	ADHK	9,70	10,13	10,56	10,95	10,35
Jumlah Penduduk*** (orang)		453.822	457.285	460.716	463.923	467.062

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

***Data proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010

Sejalan dengan pola peningkatan dan penurunan total pengeluaran konsumsi rumah tangga, rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Pesisir Selatan juga mengikuti pola yang sama selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan secara rata-rata mengeluarkan sebesar 15,91 juta rupiah per kapita per tahun. Dimana pengeluaran tersebut digunakan baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan.

Selama kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan riil pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung terus melambat. Pada tahun 2020 nilainya bahkan bernilai negatif, yakni -4,83 persen. Nilai tersebut menunjukkan terjadi penurunan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (*volume*) dari tahun sebelumnya dengan mengabaikan adanya pengaruh inflasi.

3.3. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Peranan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dalam PDRB masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, peranan komponen ini dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan semestinya dapat lebih ditingkatkan. Secara nominal, rata-rata aktivitas LNPRT di Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2016-2020 adalah 146,41 milyar rupiah per tahun dengan rata-rata proporsi sebesar 1,14 persen.

Tabel 3.3.1. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	128,57	132,72	144,35	166,19	160,21
b.	ADHK	95,93	100,16	105,69	119,84	114,13
Proporsi ADHB dalam total PDRB (Persen)		1,14	1,10	1,11	1,18	1,14
Laju pertumbuhan ADHK (Persen)		4,74	4,40	5,52	13,39	-4,76

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT Kabupaten Pesisir Selatan fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 13,39 persen, hal tersebut disebabkan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Pada tahun berikutnya terjadi perlambatan laju pertumbuhan drastis menjadi -4,76 persen. Hal ini disebabkan banyaknya agenda rutin LNPRT yang tidak dapat dilaksanakan atau hanya dapat dilaksanakan secara virtual selama pandemi Covid-19.

3.4. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terdiri dari pengeluaran konsumsi individu dan pengeluaran konsumsi kolektif. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit dan puskesmas, jasa pendidikan di sekolah atau universitas negeri, dan lain-lain. Sedangkan yang tergolong barang dan jasa kolektif yang dihasilkan pemerintah contohnya adalah jasa pertahanan oleh TNI dan keamanan yang dilakukan polisi, yaitu barang dan jasa yang aksesnya dimiliki semua orang.

Secara nominal atas dasar harga berlaku, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah terus meningkat hingga tahun 2019 sebelum akhirnya menurun di tahun berikutnya. Sedangkan secara riil atas dasar harga konstan nilainya cenderung sangat fluktuatif. Total pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku tahun 2016 adalah sebesar 1.454,25 milyar rupiah, kemudian terus meningkat hingga mencapai 1.749,65 milyar rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, nilainya turun menjadi 1.620,24 milyar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa, secara kuantitas pengeluaran konsumsi pemerintah terus meningkat sebelum adanya pandemi Covid-19. Di lain sisi, pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan sempat menurun di tahun 2017 dan 2020.

Tabel 3.4.1. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	1.454,25	1.501,56	1.636,27	1.749,65	1.620,24
b.	ADHK	990,68	983,46	1.027,55	1.080,09	987,25
Proporsi ADHB dalam total PDRB (Persen)		12,90	12,44	12,54	12,47	11,58
Laju pertumbuhan ADHK (Persen)		0,93	-0,73	4,48	5,11	-8,60
Rata-rata Konsumsi Pemerintah per Kapita (Juta Rupiah)						
a.	ADHB	3,20	3,28	3,55	3,77	3,47
b.	ADHK	2,18	2,15	2,23	2,33	2,11
Jumlah Penduduk (orang)		453.822	457.285	460.716	463.923	467.062

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi dalam rentang 11,58 persen hingga 12,90 persen. Proporsi terendah terjadi pada tahun 2020, dimana terdapat pengalihan anggaran secara nasional untuk penanganan pandemi Covid-19. Dari segi laju pertumbuhan selama periode 2016-2020, terlihat sangat fluktuatif. Pada tahun 2017 dan 2020 terkontraksi masing-masing sebesar 0,73 dan 8,60 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Penurunan atau peningkatan pada pengeluaran konsumsi pemerintah secara total akan sejalan dengan penurunan atau peningkatan pada rata-rata konsumsi akhir pemerintah per kapita. Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku per kapita maupun atas dasar harga konstan mengalami penurunan, yaitu masing-masing menjadi 3,47 juta rupiah dan 2,11 juta rupiah.

3.5. Perkembangan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor.

Tabel 3.5.1. Perkembangan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	3.435,99	3.659,13	3.948,11	4.265,81	4.171,60
b.	ADHK	2.539,10	2.653,75	2.750,41	2.887,41	2.800,45
Proporsi ADHB dalam total PDRB (Persen)		30,48	30,32	30,26	30,39	29,81
Laju pertumbuhan ADHK (Persen)		6,84	4,52	3,64	4,98	-3,01

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pada kurun waktu 2016-2020, selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT serta pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sama halnya komponen ini juga mengalami penurunan. Rata-rata peranan komponen PMTB setiap tahun cukup besar selama periode tersebut, yakni sebesar 30,25 persen. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan PMTB bergerak secara fluktuatif dengan rata-rata 3,39 persen selama rentang waktu tersebut. Dikarenakan situasi ekonomi yang melemah, banyak pelaku usaha yang urung untuk melakukan investasi selama pandemi Covid-19 melanda. Akibatnya komponen PMTB berkontraksi di tahun 2020 hingga 3,01 persen.

3.6. Perkembangan Komponen Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan jumlah persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa bernilai positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti telah terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terdapat adanya pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.6.1. Perkembangan Komponen Perubahan Inventori Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perubahan Inventori (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	144,87	7,32	10,21	4,82	16,31
b.	ADHK	104,75	5,17	7,21	3,35	10,84
Proporsi ADHB dalam total PDRB (Persen)		1,29	0,06	0,08	0,03	0,12
Laju pertumbuhan ADHK (Persen)		-	-	-	-	-

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Berdasarkan nominal atas dasar harga berlaku, distribusi perubahan inventori dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2020 berfluktuasi. Proporsi terbesar selama kurun waktu tersebut adalah pada tahun 2016 senilai 1,29 persen, sedangkan proporsi terendah adalah pada tahun 2019 sebesar 0,03 persen.

3.7. Perkembangan Komponen Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang dikonsumsi baik di wilayah ekonomi domestik maupun yang dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula di dalamnya pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 3.7.1. Perkembangan Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	7.052,29	8.536,86	8.773,88	9.252,77	8.044,76
b.	ADHK	5.430,57	6.012,08	6.105,15	6.517,47	5.557,39
Proporsi ADHB dalam total PDRB (Persen)		62,57	70,73	67,25	65,92	57,48
Laju pertumbuhan ADHK (Persen)		10,43	10,71	1,55	6,75	-14,73

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Selama periode 2016-2020, nilai ekspor atas dasar harga berlaku Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019. Nilainya beranjak dari 7.052,29 milyar rupiah di tahun 2016 menjadi 9.252,77 milyar rupiah di tahun 2019. Namun, terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 8.044,76 milyar rupiah. Sama halnya berdasarkan harga konstan, nilai ekspor terus meningkat setiap tahunnya dari 5.430,57 milyar rupiah di tahun 2016 hingga menjadi 6.517,47 milyar rupiah di tahun 2019. Pada tahun 2020, nilainya juga ikut menurun menjadi 5.557,39 milyar rupiah. Hal ini disebabkan kurangnya permintaan konsumen di luar daerah dan terhambatnya proses produksi selama pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari proporsinya, peranan ekspor barang dan jasa terus menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 70,73 persen, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2020 sebesar 57,48 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa selama kurun waktu 2016-2020 terlihat sangat fluktuatif. Pada tahun 2016-2017, laju pertumbuhan ekspor Kabupaten Pesisir Selatan berada di atas angka 10 persen. Namun, pada tahun berikutnya laju pertumbuhan sangat melambat menjadi 1,55 persen. Setelah sempat kembali terjadi percepatan hingga 6,75 persen pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa justru berkontraksi hingga 14,73 persen pada tahun 2020.

3.8. Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah), PMTB (termasuk inventori) serta ekspor mengandung produk yang berasal dari impor. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik. Oleh karena itu, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik. Cara mengeluarkannya adalah dengan mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impor. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung oleh residen di luar domestik, baik berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain maupun luar negeri.

Secara total, kegiatan impor barang dan jasa Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan sebelum adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2016, impor barang dan jasa Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku adalah sebesar 7.024,78 miliar rupiah. Jumlah ini terus meningkat menjadi 9.157,31 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup besar senilai 1.710,26 milyar rupiah. Sehingga nominal

impor barang dan jasa Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 menjadi 7.447,05 milyar rupiah. Penurunan ini terjadi seiring dengan aktivitas ekonomi yang melemah selama pandemi Covid-19 dan pengaruh faktor produksi lainnya. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan, kontribusinya selama periode 2016-2020 berkisar antara 53,21 persen hingga 68.65 persen.

Tabel 3.8.1. Perkembangan Komponen Impor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

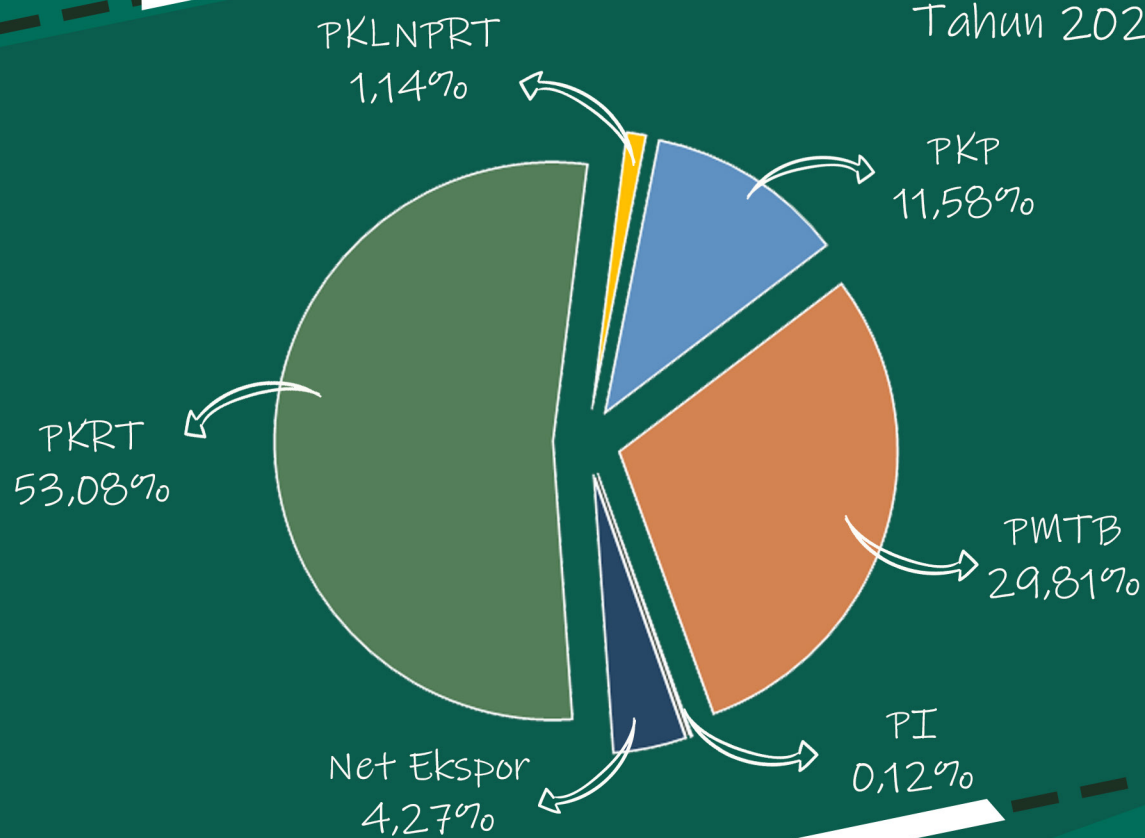
Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	7.024,78	8.285,36	8.527,07	9.157,31	7.447,05
b.	ADHK	5.331,91	5.708,89	5.721,00	6.111,74	4.834,06
Proporsi ADHB dalam total PDRB (Persen)		62,32	68,65	65,36	65,24	53,21
Laju pertumbuhan ADHK (Persen)		6,79	7,07	0,21	6,83	-20,91

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Distribusi PDRB ADHB
Tahun 2020



4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah ekonomi domestik yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas” karena menjelaskan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan produk domestik. Penghitungan dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. Data seri PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan menjadi beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan suatu wilayah digunakan data PDRB per kapita. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB sebesar nilai tersebut.

Tabel 4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	11.271,40	12.069,52	13.045,98	14.035,66	13.995,04
b.	ADHK	8.232,59	8.678,05	9.139,97	9.576,67	9.470,78
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
a.	ADHB	24,84	26,39	28,32	30,25	29,96
b.	ADHK	18,14	18,98	19,84	20,64	20,28
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (Persen)		4,48	4,61	4,54	4,05	-1,77
Jumlah Penduduk (orang)		453.822	457.285	460.716	463.923	467.062

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan riil PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Selatan umumnya berada di kisaran 4 persen selama periode 2016-2020, kecuali pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 1,77 persen. Kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang tidak hanya menyerang Kabupaten Pesisir Selatan, namun juga nasional dan dunia.

4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir, baik yang berasal dari produk domestik maupun impor, untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi ketiganya sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2.1. Distribusi Pengeluaran Konsumsi Akhir Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Akhir ADHB (Milyar Rupiah)						
a.	Konsumsi Rumah Tangga	6.080,21	6.517,29	7.060,25	7.753,72	7.428,98
b.	Konsumsi LNPRT	128,57	132,72	144,35	166,19	160,21
c.	Konsumsi Pemerintah	1.454,25	1.501,56	1.636,27	1.749,65	1.620,24
Total Pengeluaran Konsumsi Akhir		7.663,03	8.151,58	8.840,86	9.669,57	9.209,43
Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)						
a.	ADHB	11.271,40	12.069,52	13.045,98	14.035,66	13.995,04
Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB ADHB (Persen)		67,99	67,54	67,77	68,89	65,80

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dapat dilihat bahwa sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Pesisir Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Sebelum adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi akhir Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, total pengeluaran konsumsi akhir mencapai 9.209,43 milyar rupiah atau

sebesar 65,80 persen dari total PDRB. Sebagian besar dari konsumsi akhir tersebut berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga.

4.3. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter nilai tambah. Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Dengan kata lain dapat diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

ICOR = Incremental Capital Output Ratio

K = Penambahan Kapital

I_t = PDRB menurut lapangan usaha

Y_t = Konsumsi akhir

Y_{t-1} = Pembentukan Modal Tetap Bruto

Koefesien ICOR digunakan sebagai parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Jika dilihat, nilai ICOR Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 bernilai negatif. Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Untuk kasus Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020, penurunan output terjadi karena fenomena Covid-19 yang menyebabkan produktivitas ekonomi menurun. Dengan demikian, penanaman barang modal baru pada tahun itu belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu.

Tabel 4.3.1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Milyar Rupiah)	6.080,21	6.517,29	7.060,25	7.753,72	7.428,98
Perubahan ($PDRB_t - PDRB_{t-1}$)	128,57	132,72	144,35	166,19	160,21
PMTB ADHK 2010 (Milyar Rupiah)	1.454,25	1.501,56	1.636,27	1.749,65	1.620,24
ICOR	6,10	5,96	5,95	6,61	(26,45)

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

PKRT = 53,08%



Distribusi Terbesar
Tahun 2020



Laju Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2020

-1,11%

*Dampak fenomena global
Pandemi Covid-19*

5

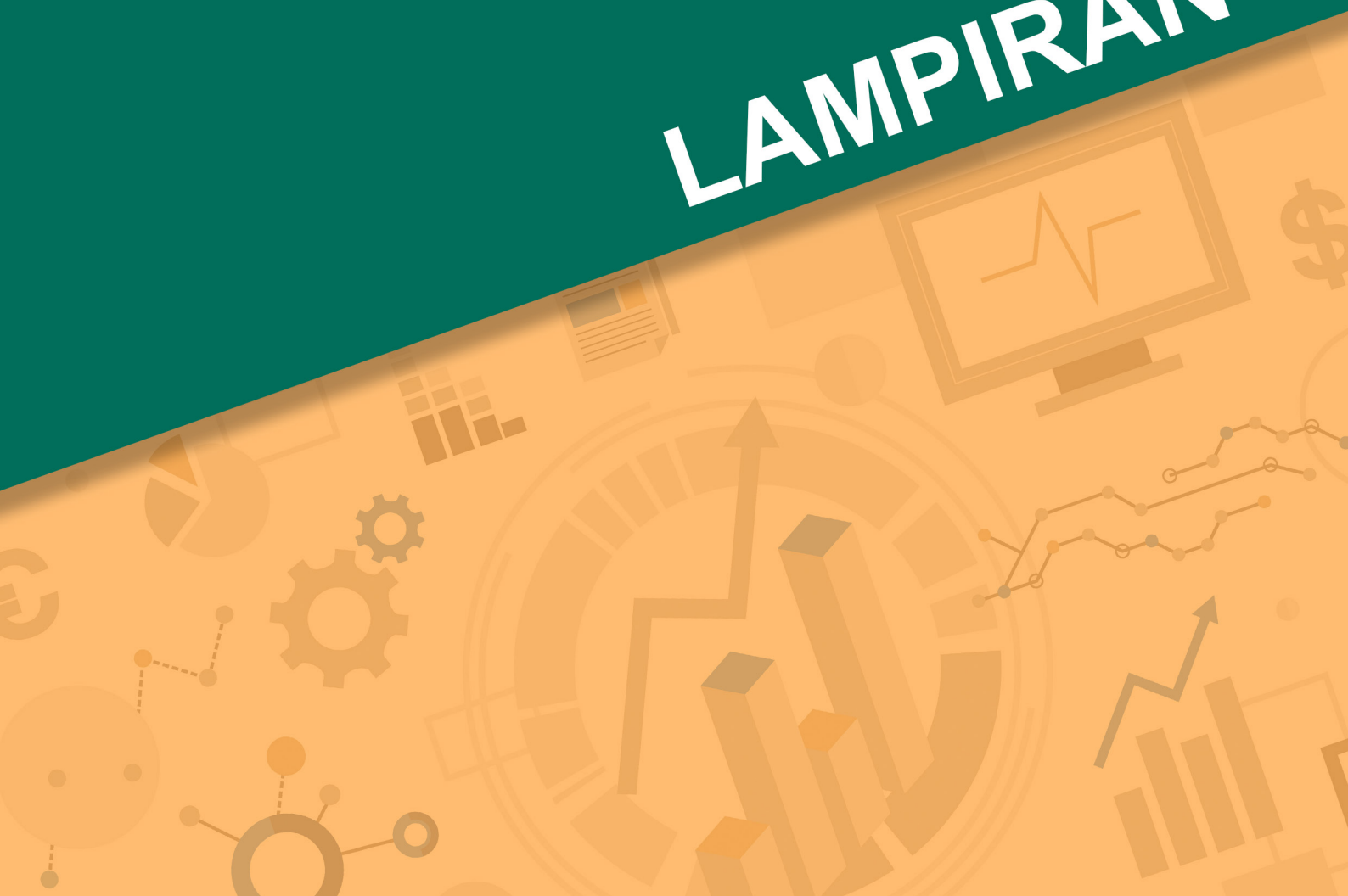
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran periode 2016-2020 menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pemerintah dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB menurut pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi seperti penduduk dan rumah tangga, sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 mencapai 13.995,04 milyar rupiah, sementara berdasarkan harga konstan adalah sebesar 9.470,78 milyar rupiah. Kontribusi pengeluaran konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah mencapai 65,80 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah sebesar -1,11 persen.
4. Seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk berbagai keperluan seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Secara langsung maupun tidak langsung juga dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha dan Tabel Input-Output.

LAMPIRAN



Lampiran 1. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	6.080,21	6.517,29	7.060,25	7.753,72	7.428,98
2	Konsumsi LNPRT	128,57	132,72	144,35	166,19	160,21
3	Konsumsi Pemerintah	1.454,25	1.501,56	1.636,27	1.749,65	1.620,24
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.435,99	3.659,13	3.948,11	4.265,81	4.171,60
5	Perubahan Inventori	144,87	7,32	10,21	4,82	16,31
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	27,51	251,50	246,81	95,46	597,71
PDRB		11.271,40	12.069,52	13.045,98	14.035,66	13.995,04

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	4.403,46	4.632,33	4.864,96	5.080,25	4.834,78
2	Konsumsi LNPRT	95,93	100,16	105,69	119,84	114,13
3	Konsumsi Pemerintah	990,68	983,46	1.027,55	1.080,09	987,25
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.539,10	2.653,75	2.750,41	2.887,41	2.800,45
5	Perubahan Inventori	104,75	5,17	7,21	3,35	10,84
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	98,66	303,18	384,15	405,73	723,34
PDRB		8.232,59	8.678,05	9.139,97	9.576,67	9.470,78

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	53,94	54,00	54,12	55,24	53,08
2	Konsumsi LNPRT	1,14	1,10	1,11	1,18	1,14
3	Konsumsi Pemerintah	12,90	12,44	12,54	12,47	11,58
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,48	30,32	30,26	30,39	29,81
5	Perubahan Inventori	1,29	0,06	0,08	0,03	0,12
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	0,24	2,08	1,89	0,68	4,27
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pegeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	53,49	53,38	53,23	53,05	51,05
2	Konsumsi LNPRT	1,17	1,15	1,16	1,25	1,21
3	Konsumsi Pemerintah	12,03	11,33	11,24	11,28	10,42
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,84	30,58	30,09	30,15	29,57
5	Perubahan Inventori	1,27	0,06	0,08	0,03	0,11
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	1,20	3,49	4,20	4,24	7,64
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	8,17	7,19	8,33	9,82	-4,19
2	Konsumsi LNPRT	10,04	3,23	8,76	15,13	-3,60
3	Konsumsi Pemerintah	6,71	3,25	8,97	6,93	-7,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,10	6,49	7,90	8,05	-2,21
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		10,53	7,08	8,09	7,59	-0,29

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,73	5,20	5,02	4,43	-4,83
2	Konsumsi LNPRT	4,74	4,40	5,52	13,39	-4,76
3	Konsumsi Pemerintah	0,93	-0,73	4,48	5,11	-8,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,84	4,52	3,64	4,98	-3,01
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		5,33	5,41	5,32	4,78	-1,11

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	176,71	189,41	205,19	225,35	215,91
2	Konsumsi LNPRT	191,10	197,27	214,55	247,02	238,12
3	Konsumsi Pemerintah	179,60	185,45	202,08	216,09	200,10
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	196,06	208,79	225,28	243,41	238,03
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		191,22	204,76	221,33	238,12	237,43

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	127,98	134,63	141,39	147,65	140,51
2	Konsumsi LNPRT	142,59	148,86	157,08	178,12	169,63
3	Konsumsi Pemerintah	122,35	121,46	126,91	133,39	121,93
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	144,88	151,42	156,94	164,76	159,79
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		139,67	147,22	155,06	162,47	160,67

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 9. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	138,08	140,69	145,12	152,62	153,66
2	Konsumsi LNPRT	134,02	132,52	136,58	138,68	140,38
3	Konsumsi Pemerintah	146,79	152,68	159,24	161,99	164,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	135,32	137,89	143,55	147,74	148,96
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		136,91	139,08	142,74	146,56	147,77

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,28	1,89	3,15	5,17	0,68
2	Konsumsi LNPRT	5,06	-1,13	3,07	1,54	1,22
3	Konsumsi Pemerintah	5,73	4,01	4,30	1,73	1,31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,11	1,89	4,11	2,92	0,83
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		4,94	1,58	2,63	2,68	0,83

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jalan Setia Budi Painan, Telp (0756) 21004, Fax (0756) 21004

Website: <http://pessirkab.bps.go.id>, Email: bps1302@bps.go.id

ISBN 978-602-5481-86-4

